CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG DIALOG POLITIK: PERSPEKTIF KESADARAN KRITIS PAULO FREIRE PADA KOMUNIKASI DPW PKB JAWA TIMUR

Damar Fahmi Ali Mustofa[1], Muhdi[2]

Email: dmrfahmi@gmail.com, muhdi@uinsa.ac.id
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract

The development of social media has transformed political communication patterns, which were previously characterized by one-way communication, into more interactive and participatory forms. This article aims to analyze the role of social media as a space for political dialogue from the perspective of Paulo Freire's Critical Consciousness Theory, focusing on the communication practices of the East Java Regional Leadership Council of the National Awakening Party (DPW PKB Jawa Timur). This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observations conducted during an internship at the DPW PKB Jawa Timur Media Center and a literature review of relevant sources. The findings indicate that social media has the potential to serve as a platform for dialogic communication, enabling interaction between political parties and the public. Furthermore, social media can improve public access to information on various social and political issues, potentially fostering critical consciousness and encouraging participation in social and political activities. However, the use of social media as a space for political dialogue continues to face several challenges, including the spread of hoaxes, political polarization, low levels of digital literacy, and the tendency to maintain one-way communication focused primarily on information dissemination. From Paulo Freire's perspective, dialogue should not merely function as a means of transmitting information but also as a process of exchanging ideas and engaging in critical reflection that encourages public consciousness and involvement. Therefore, more dialogic, participatory, and educational social media management is needed to support the development of critical public consciousness.

Keywords: *Social Media, Political Communication, Critical Consciousness, Paulo Freire, DPW PKB Jawa Timur.*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik yang semula cenderung bersifat satu arah menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Artikel ini

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini
[2] Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai ruang dialog politik dalam perspektif teori kesadaran kritis Paulo Freire pada praktik komunikasi DPW PKB Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi selama kegiatan magang di Media Center DPW PKB Jawa Timur dan studi pustaka terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi sebagai sarana komunikasi dialogis yang memungkinkan terbangunnya interaksi antara partai politik dan masyarakat. Selain itu, media sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai berbagai isu sosial dan politik sehingga berpotensi mendorong terbentuknya kesadaran kritis dan partisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Namun, pemanfaatan media sosial sebagai ruang dialog politik masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, rendahnya literasi digital, serta kecenderungan komunikasi yang masih berorientasi pada penyampaian informasi secara satu arah. Dalam perspektif Paulo Freire, dialog seharusnya tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi proses pertukaran gagasan dan refleksi kritis yang mendorong kesadaran serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan media sosial yang lebih dialogis, partisipatif, dan edukatif agar dapat mendukung terbentuknya kesadaran kritis masyarakat.

Kata Kunci: Media Sosial, Komunikasi Politik, Kesadaran Kritis, Paulo Freire, DPW PKB Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Kehadiran internet yang semakin mudah diakses serta pertumbuhan penggunaan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan mendistribusikan informasi politik. Jika sebelumnya komunikasi politik lebih banyak berlangsung melalui media massa konvensional, seperti televisi, radio, dan surat kabar, saat ini media sosial hadir sebagai ruang baru yang memungkinkan informasi politik disebarkan secara cepat, luas, dan interaktif. Perubahan tersebut menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai arena komunikasi politik yang mempertemukan berbagai aktor politik dengan masyarakat dalam ruang digital (Alam, 2021; Johansson, 2019).

Dalam sistem demokrasi, komunikasi politik memiliki peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan aktor-aktor politik. Melalui komunikasi politik, masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan publik, program pembangunan, serta berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain,

komunikasi politik juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan kepada para pengambil kebijakan. Perkembangan media sosial semakin memperluas fungsi tersebut karena karakteristiknya memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Berbeda dengan media konvensional yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai penerima pesan, media sosial memberikan ruang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan terlibat dalam diskursus politik (McNair, 2011; Alam, 2021).

Fenomena tersebut mendorong berbagai partai politik untuk memanfaatkan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik. Kehadiran media sosial memungkinkan partai politik menjangkau masyarakat secara lebih luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan X (Twitter), digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program kerja, kegiatan organisasi, pandangan politik, hingga respons terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dalam perkembangannya, media sosial tidak lagi sekadar digunakan sebagai media publikasi, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan antara partai politik dan masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki kedekatan dengan penggunaan teknologi digital (Mihálik et al., 2022; Espinoza Bianchini et al., 2022).

Sebagai salah satu partai politik yang memanfaatkan media sosial dalam aktivitas komunikasinya, DPW PKB Jawa Timur turut menjadikan platform digital sebagai bagian dari komunikasi organisasi. Melalui Media Center dan berbagai kanal media sosial, informasi mengenai kegiatan kepartaian, program sosial, agenda kelembagaan, serta isu-isu publik dapat disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang di Media Center DPW PKB Jawa Timur, pemanfaatan media sosial memperlihatkan adanya peluang bagi partai untuk membangun komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai fitur digital, seperti kolom komentar, pesan langsung, dan berbagi konten. Keberadaan fitur tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan partai. Dengan demikian, media sosial berpotensi menjadi ruang komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya dialog antara partai politik dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Paulo Freire mengenai kesadaran kritis (*critical consciousness*) relevan digunakan sebagai perspektif analisis. Freire memandang bahwa komunikasi dan proses pembentukan kesadaran seharusnya tidak berlangsung secara satu arah, melainkan melalui dialog yang menempatkan setiap individu sebagai subjek aktif. Melalui komunikasi dialogis, individu didorong untuk memahami realitas sosial yang dihadapi secara kritis sehingga mampu mengenali berbagai persoalan di sekitarnya. Kesadaran tersebut kemudian menjadi dasar bagi lahirnya *praxis*, yaitu perpaduan antara refleksi dan tindakan yang diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial (Freire, 2000).

Konsep kesadaran kritis yang dikemukakan Freire memiliki keterkaitan dengan karakteristik media sosial di era digital. Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan, menyampaikan pandangan, serta berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu publik.

Dalam perspektif ini, media sosial berpotensi menjadi ruang dialog politik yang mendorong masyarakat memahami realitas sosial dan politik secara lebih kritis. Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, rendahnya literasi digital, serta kecenderungan penggunaan media sosial yang masih berfokus pada penyebaran informasi secara satu arah (Alam, 2021; Chan & Yi, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan media sosial tidak secara otomatis menghasilkan komunikasi yang dialogis dan kesadaran kritis di tengah masyarakat.

Dalam praktik komunikasi DPW PKB Jawa Timur, tantangan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan. Pemanfaatan media sosial tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan partai dalam memproduksi dan menyebarkan konten, tetapi juga perlu ditinjau dari sejauh mana media tersebut dimanfaatkan untuk membangun interaksi dan membuka ruang pertukaran gagasan dengan masyarakat. Media sosial yang dikelola sebatas sebagai saluran publikasi berpotensi mempertahankan pola komunikasi satu arah, meskipun secara teknis menyediakan berbagai fitur interaktif. Sebaliknya, apabila dikelola secara dialogis, media sosial dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengemukakan kritik, serta terlibat dalam pembahasan isu-isu publik. Oleh karena itu, praktik komunikasi DPW PKB Jawa Timur menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pemanfaatan media sosial, dialog politik, dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai ruang dialog politik dalam praktik komunikasi DPW PKB Jawa Timur, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif kesadaran kritis Paulo Freire. Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa media sosial memiliki potensi interaktif, tetapi pemanfaatannya dalam komunikasi politik belum tentu mencerminkan dialog yang setara dan partisipatif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai ruang dialog politik dalam perspektif kesadaran kritis Paulo Freire pada praktik komunikasi DPW PKB Jawa Timur?** Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai ruang dialog politik serta menginterpretasikan praktik komunikasi tersebut melalui konsep dialog, kesadaran kritis, dan *praxis* Paulo Freire. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi politik, khususnya mengenai hubungan antara media sosial, dialog politik, dan kesadaran kritis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi DPW PKB Jawa Timur dalam mengembangkan pengelolaan media sosial yang lebih dialogis, partisipatif, dan edukatif.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami dan menginterpretasikan fenomena komunikasi politik melalui media sosial berdasarkan konteks,

aktivitas, serta praktik komunikasi yang berlangsung di DPW PKB Jawa Timur. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial (Creswell, 2014). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi dan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel atau mengukur efektivitas suatu kegiatan. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai sesuai untuk menjelaskan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai ruang dialog politik serta menginterpretasikan praktik komunikasi tersebut melalui perspektif teori kesadaran kritis Paulo Freire.

Subjek penelitian ini adalah praktik komunikasi politik DPW PKB Jawa Timur, khususnya aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan media sosial yang dilakukan melalui Media Center DPW PKB Jawa Timur. Subjek tersebut dipilih karena Media Center menjadi bagian dari aktivitas organisasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi, publikasi kegiatan, dan komunikasi partai kepada masyarakat. Adapun objek penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial sebagai ruang dialog politik yang dikaji melalui aspek penyampaian informasi, interaksi antara partai dan masyarakat, keterbukaan terhadap aspirasi, serta peluang terbentuknya kesadaran kritis. Lokasi penelitian berada di Media Center DPW PKB Jawa Timur, Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu aktivitas komunikasi digital yang dijalankan oleh organisasi partai politik di tingkat provinsi. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi dan partisipan perlu mempertimbangkan kesesuaian konteks dengan fenomena yang hendak dipahami (Creswell & Poth, 2018).

Penentuan sumber data dan bahan pengamatan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan cara memilih sumber data secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama kesesuaian sumber dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan partisipan dan lokasi secara sengaja dilakukan karena keduanya dinilai mampu memberikan pemahaman yang relevan terhadap permasalahan penelitian (Creswell, 2014). Dalam artikel ini, pemilihan bahan pengamatan dilakukan berdasarkan relevansinya dengan aktivitas komunikasi DPW PKB Jawa Timur, khususnya konten media sosial yang memuat informasi kepartaian, program organisasi, kegiatan sosial, isu publik, serta bentuk interaksi dengan masyarakat. Dokumen dan literatur juga dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan komunikasi politik digital dan pemikiran kesadaran kritis Paulo Freire. Dengan demikian, sumber data yang digunakan tidak dipilih secara acak, tetapi didasarkan pada kemampuannya mendukung analisis terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan magang di Media Center DPW PKB Jawa Timur dengan memperhatikan aktivitas komunikasi digital, proses publikasi informasi, pengelolaan konten, serta bentuk interaksi yang muncul melalui media sosial. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah materi publikasi, unggahan media sosial, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi DPW PKB Jawa Timur. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas komunikasi politik digital serta teori kesadaran kritis Paulo Freire. Pengumpulan data dalam penelitian

kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan berbagai sumber informasi lain yang relevan (Creswell & Poth, 2018). Kombinasi teknik tersebut dipilih agar fenomena yang dikaji tidak hanya dipahami berdasarkan pengamatan langsung, tetapi juga didukung oleh bukti dokumenter dan landasan konseptual.

Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui hasil observasi dengan dokumentasi aktivitas komunikasi DPW PKB Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara praktik komunikasi yang diamati dengan konten dan materi publikasi yang tersedia. Triangulasi merupakan salah satu strategi validasi dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber atau metode untuk memperkuat kredibilitas temuan (Creswell & Poth, 2018). Triangulasi dipilih karena dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis data sekaligus memperkuat keandalan interpretasi penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasikan hasil observasi serta dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar pola pemanfaatan media sosial, bentuk interaksi, dan kecenderungan komunikasi DPW PKB Jawa Timur dapat dipahami. Selanjutnya, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola temuan berdasarkan perspektif kesadaran kritis Paulo Freire, terutama konsep dialog, kesadaran kritis, dan *praxis*. Model analisis ini dipilih karena memungkinkan proses analisis berlangsung secara berkelanjutan sejak data dikumpulkan hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Pembahasan ini menggunakan teori kesadaran kritis Paulo Freire sebagai landasan untuk memahami pemanfaatan media sosial dalam komunikasi politik DPW PKB Jawa Timur. Freire memandang komunikasi sebagai proses dialogis yang memungkinkan individu saling bertukar gagasan, memahami realitas sosial, dan membangun kesadaran kritis melalui refleksi serta tindakan. Dalam kerangka tersebut, media sosial tidak cukup dipahami hanya sebagai saluran penyampaian informasi politik, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan kemampuannya membuka ruang dialog, memperluas pemahaman masyarakat terhadap persoalan publik, dan mendorong keterlibatan dalam kehidupan sosial maupun politik. Oleh karena itu, pembahasan ini diuraikan melalui empat aspek yang saling berkaitan, yaitu media sosial sebagai sarana komunikasi dialogis, media sosial dan kesadaran terhadap realitas sosial, hubungan kesadaran dengan aksi kolektif, serta tantangan media sosial sebagai ruang dialog politik.

1. Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Dialogis

Paulo Freire memandang dialog sebagai fondasi utama dalam proses pembentukan kesadaran kritis masyarakat. Menurutnya, komunikasi tidak seharusnya berlangsung secara satu arah, ketika satu pihak hanya bertugas menyampaikan informasi sementara pihak lainnya hanya menerima informasi secara pasif. Model komunikasi semacam ini tidak mampu mendorong lahirnya pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial. Sebaliknya, Freire menekankan pentingnya komunikasi dialogis, yaitu proses komunikasi yang menempatkan komunikator dan komunikan sebagai subjek yang setara sehingga keduanya dapat saling bertukar gagasan, pengalaman, serta pandangan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Dialog dalam pemikiran Freire bukan sekadar percakapan, melainkan proses refleksi bersama untuk memahami dan mengubah realitas sosial (Freire, 2000).

Perkembangan media sosial menghadirkan ruang yang memungkinkan terwujudnya komunikasi dialogis dalam skala yang lebih luas. Berbagai fitur seperti kolom komentar, pesan langsung, polling, siaran langsung, hingga fitur berbagi konten memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Dengan adanya ruang interaksi tersebut, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses komunikasi dan turut membentuk percakapan publik yang berkembang di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki karakteristik interaktif yang dapat memperluas peluang partisipasi audiens dibandingkan pola komunikasi media konvensional yang cenderung lebih terbatas (Alam, 2021; Johansson, 2019).

Dalam konteks komunikasi politik, media sosial telah menjadi instrumen penting bagi partai politik untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Kehadiran media sosial memungkinkan proses penyampaian informasi berlangsung lebih cepat, luas, dan interaktif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mendorong transformasi komunikasi politik karena masyarakat memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan aktor politik maupun organisasi politik yang mereka ikuti (Mihálik et al., 2022; Gilardi et al., 2022). Praktik tersebut juga terlihat dalam pemanfaatan media sosial oleh DPW PKB Jawa Timur. Sebagai bagian dari strategi komunikasi organisasi, media sosial digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai program kerja, kegiatan kepartaian, agenda kelembagaan, serta berbagai isu publik yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Melalui media sosial, informasi dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, audiens juga memiliki kesempatan untuk memberikan respons terhadap berbagai konten yang dipublikasikan melalui kolom komentar maupun fitur interaktif lainnya.

Keberadaan ruang interaksi tersebut menunjukkan adanya peluang terciptanya komunikasi dua arah antara partai politik dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun kritik terhadap informasi yang disampaikan. Dalam perspektif Freire, kondisi ini merupakan langkah awal menuju komunikasi yang lebih demokratis karena memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka dan setara (Freire, 2000). Oleh sebab itu, media sosial dapat dipahami sebagai sarana komunikasi dialogis yang berpotensi

memperkuat hubungan antara partai politik dan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam kehidupan politik.

2. Media Sosial dan Kesadaran terhadap Realitas Sosial

Setelah dialog terbangun, tahapan berikutnya dalam teori kesadaran kritis Paulo Freire adalah berkembangnya kesadaran terhadap realitas sosial. Freire menegaskan bahwa tujuan utama komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membantu individu memahami kondisi sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. Kesadaran kritis lahir ketika masyarakat mampu melihat berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya secara reflektif, memahami penyebabnya, serta menyadari posisi mereka dalam realitas sosial tersebut. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya mengetahui suatu peristiwa, tetapi juga mampu memahami makna dan implikasi dari peristiwa tersebut. Kesadaran kritis terbentuk melalui proses pembacaan realitas secara mendalam, bukan sekadar penerimaan informasi secara pasif (Freire, 2000).

Dalam era digital, media sosial memiliki peran yang semakin penting dalam proses pembentukan kesadaran sosial masyarakat. Kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kebijakan publik, kondisi ekonomi, pendidikan, pembangunan daerah, maupun berbagai isu sosial lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Arus informasi tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperluas wawasan serta memahami berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media penyebaran pengetahuan politik dan sosial yang dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap realitas publik (Espinoza Bianchini et al., 2022; Gilardi et al., 2022).

Menurut Freire, kesadaran kritis tidak muncul secara otomatis dari banyaknya informasi yang diterima. Kesadaran kritis berkembang melalui proses refleksi terhadap informasi tersebut. Dalam konteks media sosial, refleksi dapat terjadi ketika masyarakat tidak hanya membaca atau melihat suatu informasi, tetapi juga berusaha memahami latar belakang, penyebab, serta dampak dari isu yang sedang dibahas. Proses inilah yang membedakan antara masyarakat yang sekadar mengonsumsi informasi dengan masyarakat yang memiliki kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang dihadapinya. Dengan demikian, informasi perlu diolah melalui proses berpikir dan penilaian kritis agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Freire, 2000).

Dalam praktiknya, media sosial DPW PKB Jawa Timur tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi sarana penyebaran berbagai informasi yang berkaitan dengan isu publik. Berbagai konten yang dipublikasikan dapat memuat informasi mengenai kegiatan sosial, pembangunan daerah, pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, maupun berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kehadiran konten semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, penyebaran informasi melalui media sosial memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan kecepatan distribusi. Informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui forum-forum tertentu kini dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas melalui perangkat digital yang mereka miliki. Kondisi ini memungkinkan proses penyebaran pengetahuan politik dan sosial berlangsung secara lebih terbuka. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi politik serta keterlibatan mereka dalam memahami isu-isu yang berkembang di ruang publik (Espinoza Bianchini et al., 2022; Chan & Yi, 2024). Dari perspektif Paulo Freire, media sosial yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai isu-isu publik memiliki potensi untuk mendorong terbentuknya kesadaran kritis masyarakat. Melalui informasi yang edukatif dan relevan, masyarakat dapat memahami berbagai persoalan sosial secara lebih mendalam serta mengembangkan kemampuan untuk menilai realitas yang mereka hadapi secara kritis. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran yang berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial dan politik masyarakat.

3. Dari Kesadaran Menuju Aksi Kolektif

Dalam teori kesadaran kritis Paulo Freire, kesadaran terhadap realitas sosial bukanlah tujuan akhir dari proses pembelajaran maupun komunikasi. Freire menekankan bahwa kesadaran perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang bertujuan merespons atau mengubah kondisi sosial yang dihadapi masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *praxis*, yaitu perpaduan antara refleksi dan tindakan. Menurut Freire, individu yang telah memiliki kesadaran kritis tidak akan berhenti pada tahap memahami suatu persoalan, tetapi juga terdorong untuk mengambil bagian dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut secara bersama-sama. Dalam konteks kehidupan demokratis, aksi kolektif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti menyampaikan aspirasi, mengikuti diskusi publik, terlibat dalam kegiatan sosial, maupun berpartisipasi dalam proses politik (Freire, 2000).

Kehadiran media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi tersebut. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai berbagai isu publik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, membangun jaringan komunikasi, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Penelitian mengenai penggunaan media sosial dan partisipasi politik menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana mobilisasi serta keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik dan sosial (Young, 2023; Chan & Yi, 2024).

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Jika sebelumnya partisipasi publik sering kali terbatas oleh faktor geografis maupun akses informasi, media sosial memungkinkan masyarakat terhubung dengan berbagai informasi dan kegiatan secara lebih mudah. Berbagai agenda sosial, kegiatan kemasyarakatan, diskusi publik, hingga kampanye politik dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat melalui platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Kondisi

ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki fungsi yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif.

Dalam praktik komunikasi yang dilakukan oleh DPW PKB Jawa Timur, media sosial berperan sebagai sarana yang menghubungkan informasi dengan peluang partisipasi masyarakat. Berbagai publikasi mengenai kegiatan organisasi, agenda sosial, program pemberdayaan masyarakat, maupun isu-isu publik dapat menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan. Melalui media sosial, masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah mengenai kegiatan yang dapat mereka ikuti maupun berbagai isu yang membutuhkan perhatian bersama.

Selain itu, interaksi yang terjadi di media sosial juga dapat menjadi bentuk partisipasi awal masyarakat dalam ruang publik digital. Tanggapan, diskusi, maupun penyampaian aspirasi yang dilakukan melalui platform digital menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan untuk mengambil peran dalam proses komunikasi politik. Dalam perspektif Freire, keterlibatan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi kesadaran kritis karena masyarakat mulai menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan tindakan yang dilakukan (Freire, 2000). Meski demikian, aksi kolektif tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk mobilisasi politik yang besar. Partisipasi dalam diskusi publik, keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penyampaian aspirasi secara konstruktif, hingga upaya menyebarkan informasi yang bermanfaat juga merupakan bentuk tindakan yang dapat lahir dari kesadaran sosial. Oleh karena itu, media sosial dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan proses dialog, pembentukan kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial maupun politik.

Berdasarkan perspektif Paulo Freire, keberadaan media sosial memberikan peluang bagi lahirnya aksi kolektif yang berangkat dari pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial yang mereka hadapi. Ketika informasi yang diterima mampu membangun kesadaran kritis dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas publik, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan dapat menjadi instrumen yang mendukung tumbuhnya partisipasi dan keterlibatan warga dalam kehidupan demokrasi. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada sejauh mana komunikasi digital mampu menghubungkan proses refleksi dengan tindakan nyata, bukan hanya menghasilkan interaksi yang berhenti pada aktivitas menyukai, membagikan, atau mengomentari konten.

4. Tantangan Media Sosial sebagai Ruang Dialog Politik

Meskipun media sosial memiliki potensi besar sebagai ruang dialog politik, pembentukan kesadaran sosial, dan pendorong partisipasi masyarakat, pemanfaatannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, media sosial tidak selalu menghadirkan ruang komunikasi yang ideal sebagaimana yang dibayangkan dalam konsep komunikasi dialogis Paulo Freire. Berbagai persoalan yang muncul di ruang digital justru dapat menghambat terwujudnya dialog yang sehat dan konstruktif.

Salah satu tantangan utama adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi melalui media sosial membuat informasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat tersebar kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan informasi yang valid dengan informasi yang menyesatkan. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pembentukan kesadaran kritis karena masyarakat berisiko membangun pemahaman berdasarkan informasi yang tidak akurat. Dalam konteks komunikasi politik, penyebaran informasi yang keliru juga dapat menimbulkan kesalahpahaman serta menurunkan kualitas diskusi publik yang berlangsung di ruang digital (McNair, 2011).

Tantangan berikutnya adalah polarisasi politik yang semakin terlihat dalam penggunaan media sosial. Ruang digital sering kali menjadi arena pertarungan opini yang memunculkan kelompok-kelompok dengan pandangan politik berbeda. Alih-alih menjadi ruang dialog yang terbuka, media sosial terkadang berubah menjadi ruang konflik yang dipenuhi saling serang dan penguatan identitas kelompok. Penelitian Chan dan Yi (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan keterlibatan politik berkaitan dengan konteks polarisasi isu maupun polarisasi afektif. Selain itu, interaksi politik di media sosial juga dapat memperkuat kecenderungan pengguna untuk berinteraksi dengan kelompok yang memiliki kesamaan pandangan (Yu et al., 2024). Situasi semacam ini bertentangan dengan gagasan Freire yang menekankan pentingnya dialog sebagai sarana membangun pemahaman bersama. Ketika perbedaan pandangan tidak lagi dihadapi melalui diskusi yang terbuka dan reflektif, fungsi media sosial sebagai ruang pembelajaran politik menjadi semakin terbatas (Freire, 2000).

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi merupakan prasyarat penting dalam membangun kesadaran kritis. Namun, tidak semua pengguna media sosial memiliki kemampuan tersebut. Sebagian masyarakat masih cenderung menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, ruang digital rentan dipenuhi informasi yang tidak akurat, provokatif, maupun manipulatif. Dalam kondisi seperti ini, media sosial berpotensi menjadi sarana reproduksi informasi yang keliru daripada menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menilai dan merefleksikan informasi secara kritis (Freire, 2000).

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah kecenderungan komunikasi politik yang masih berlangsung secara satu arah. Meskipun media sosial menyediakan berbagai fitur interaktif, tidak semua aktor politik memanfaatkannya untuk membangun dialog dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, media sosial masih digunakan sebatas sebagai media publikasi kegiatan, penyampaian informasi, atau pencitraan politik. Interaksi yang terjadi sering kali terbatas pada penyebaran pesan tanpa adanya respons yang memadai terhadap aspirasi maupun tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan komunikasi dialogis apabila tidak diikuti oleh komitmen untuk membangun keterlibatan publik yang bermakna. Dalam perspektif Freire, komunikasi yang hanya menempatkan

masyarakat sebagai penerima pesan belum mencerminkan dialog yang setara dan partisipatif (Freire, 2000).

Di samping itu, algoritma media sosial juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas dialog politik di ruang digital. Algoritma dapat membentuk pola paparan informasi berdasarkan preferensi dan riwayat interaksi pengguna sehingga masyarakat berpotensi lebih sering menjumpai konten yang sejalan dengan pandangan yang telah mereka miliki. Fenomena ini berkaitan dengan *echo chamber* dan homofili politik, yaitu kecenderungan individu untuk berinteraksi dengan informasi maupun kelompok yang memiliki kesamaan pandangan. Kondisi tersebut dapat membatasi peluang masyarakat untuk memahami perspektif yang berbeda dan mempersempit ruang dialog yang terbuka (Cheng et al., 2024; Yu et al., 2024).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa media sosial memiliki posisi yang paradoksal dalam komunikasi politik. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi terciptanya dialog, pembentukan kesadaran sosial, dan partisipasi masyarakat. Namun, di sisi lain, berbagai persoalan seperti hoaks, polarisasi, keterbatasan literasi digital, komunikasi satu arah, serta pengaruh algoritma dapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan masyarakat, untuk memanfaatkan media sosial secara lebih bijak sehingga ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana dialog politik yang edukatif, partisipatif, dan demokratis.

Secara teoretis, keempat aspek tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran kesadaran kritis Paulo Freire dapat digunakan untuk membaca pemanfaatan media sosial dalam komunikasi politik melalui hubungan antara dialog, refleksi terhadap realitas sosial, dan tindakan kolektif. Dialog menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk bertukar gagasan secara setara; informasi yang diperoleh melalui dialog kemudian dapat mendorong pemahaman kritis terhadap persoalan publik; sedangkan kesadaran yang terbentuk diharapkan berkembang menjadi tindakan dan partisipasi sosial maupun politik. Meskipun demikian, proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis karena dipengaruhi oleh kualitas informasi, keterbukaan komunikasi, literasi digital, serta kesediaan aktor politik untuk merespons aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif Freire, keberhasilan media sosial sebagai ruang dialog politik tidak cukup diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan atau tingginya interaksi digital, tetapi juga dari kemampuannya membangun pertukaran gagasan yang setara, mendorong refleksi kritis, dan membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokratis.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Media sosial dimanfaatkan oleh DPW PKB Jawa Timur sebagai sarana komunikasi politik melalui penyampaian informasi mengenai program kerja, kegiatan kepartaian, agenda kelembagaan, serta berbagai isu publik kepada masyarakat. Pemanfaatan tersebut membuka peluang terbentuknya komunikasi dua arah melalui kolom komentar, pesan langsung, dan fitur interaktif lainnya yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan maupun

menyampaikan aspirasi. Dalam perspektif kesadaran kritis Paulo Freire, pemanfaatan media sosial tersebut dapat dipahami melalui tiga proses yang saling berkaitan. Pertama, dialog, yaitu terbukanya ruang pertukaran informasi dan gagasan antara partai politik dan masyarakat. Kedua, pembentukan kesadaran kritis, yaitu tersedianya akses informasi yang dapat membantu masyarakat memahami dan merefleksikan berbagai persoalan sosial maupun politik. Ketiga, *praxis*, yaitu peluang menghubungkan pemahaman terhadap persoalan publik dengan tindakan dan partisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik.

Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial sebagai ruang dialog politik belum sepenuhnya mencerminkan dialog ideal sebagaimana dikemukakan Freire. Hal ini karena ruang digital masih menghadapi tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi politik, keterbatasan literasi digital, kecenderungan komunikasi satu arah, dan pengaruh algoritma yang dapat membatasi keterbukaan pertukaran gagasan. Dengan demikian, media sosial DPW PKB Jawa Timur memiliki potensi sebagai ruang dialog politik yang mendukung pembentukan kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat, tetapi potensi tersebut bergantung pada kemampuan pengelolaannya dalam membangun komunikasi yang terbuka, setara, responsif, dan edukatif. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial perlu diarahkan tidak hanya pada publikasi informasi dan penguatan citra organisasi, tetapi juga pada pengembangan dialog yang memungkinkan masyarakat terlibat secara bermakna dalam kehidupan demokratis

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Avant Garde, 9*(1), 68–78. https://doi.org/10.36080/ag.v9i1.1257

Chan, M., & Yi, J. (2024). Social media use and political engagement in polarized times: Examining the contextual roles of issue and affective polarization in developed democracies. *Political Communication, 41*(5), 743–762. https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325423

Cheng, Z., Marcos-Marne, H., & Gil de Zúñiga, H. (2024). Birds of a feather get angrier together: Social media news use and social media political homophily as antecedents of political anger. *Political Behavior, 46*, 1171–1187. https://doi.org/10.1007/s11109-023-09864-z

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Espinoza Bianchini, G., Navia, P., & Ulriksen Lira, C. (2022). Using online social networks to acquire political information: The politically engaged non-ideological youth in Chile, 2017–2019. *International Journal of Politics, Culture, and Society, 35*(4), 497–515. https://doi.org/10.1007/s10767-021-09407-6

Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed., M. B. Ramos, Trans.). Continuum.

Gilardi, F., Gessler, T., Kubli, M., & Müller, S. (2022). Social media and political agenda setting. *Political Communication, 39*(1), 39–60. https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910390

Johansson, E. (2019). Social media in political communication: A substitute for conventional media? In K. M. Johansson & G. Nygren (Eds.), *Close and distant: Political executive-media relations in four countries* (pp. 149–174). Nordicom.

McNair, B. (2011). *An introduction to political communication* (5th ed.). Routledge.

Mihálik, J., Garaj, M., & Bardovič, J. (2022). Social media and political communication of youth political organisations in Slovakia, Czechia and European level: A cross-case analysis. *Social Sciences, 11*(2), 69. https://doi.org/10.3390/socsci11020069

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Young, L. E. (2023). Mobilization under threat: Emotional appeals and pro-opposition political participation online. *Political Behavior, 45*, 445–468. https://doi.org/10.1007/s11109-021-09711-z

Yu, X., Wojcieszak, M., & Casas, A. (2024). Partisanship on social media: In-party love among American politicians, greater engagement with out-party hate among ordinary users. *Political Behavior, 46*, 799–824. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09850-x